

**POLITIK LUAR NEGERI INDONESIA DALAM ISU LINGKUNGAN:  
STUDI KASUS “KEPENTINGAN INDONESIA DALAM KTT  
PERUBAHAN IKLIM DI PARIS TAHUN 2015”**

**TESIS**



**Oleh : Desi Arisanti  
20151060010**

**PROGRAM STUDI ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA  
2017**

**POLITIK LUAR NEGERI INDONESIA DALAM ISU LINGKUNGAN:  
STUDI KASUS “KEPENTINGAN INDONESIA DALAM KTT  
PERUBAHAN IKLIM DI PARIS TAHUN 2015”**

**Tesis**

**Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan Untuk Memperoleh  
Gelar Sarjana Strata 2**

**Program Studi Magister Ilmu Hubungan  
Internasional**



**Oleh : Desi Arisanti**

**20151060010**

**PROGRAM STUDI ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA  
2017**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**TESIS**

**POLITIK LUAR NEGERI INDONESIA DALAM ISU LINGKUNGAN:  
STUDI KASUS “KEPENTINGAN INDONESIA DALAM KTT  
PERUBAHAN IKLIM DI PARIS TAHUN 2015”**

**DESI ARISANTI**

**20151060010**

Telah di pertahankan dalam ujian pendadaran, dinyatakan Lulus dan disahkan dihadapan Tim Penguji Tesis Program Studi Magister Ilmu Hubungan Internasional Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Pada :

Hari/tanggal : Kamis, 24 Agustus 2017

Pukul : 10.00 WIB

Tempat : Ruang Studi Hall MIHI

**TIM PENGUJI**

**Prof. Tulus Warsito**

**Ketua Penguji**

**Ali Maksum, Ph.D**

**Penguji Samping I**

**Ali Muhammad Ph.D**

**Penguji Samping II**

## HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Tesis saya ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik baik di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta ataupun di Perguruan Tinggi lain.

Dalam Tesis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan aturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Yogyakarta, 9 September 2017



Penulis

Desi Arisanti

## ABSTRAK

Isu tentang pemanasan global telah menjadi ancaman bagi keamanan setiap manusia, karena semakin meningkatnya jumlah emisi gas rumah kaca (GRK) yang dihasilkan di bumi dan faktor penyebab adalah aktivitas manusia yang secara terus menerus menggunakan bahan bakar yang berasal dari fosil seperti batubara, gas bumi dan minyak bumi. Pada saat ini peningkatan emisi GRK tidak hanya disebabkan oleh sektor industri yang dihasilkan oleh negara maju, namun negara berkembang juga ikut terlibat menyumbang emisi GRK. Peningkatan emisi ini dihasilkan dari deforestasi dan degradasi hutan yang telah mencapai 20% dari keseluruhan emisi GRK global setiap tahunnya.

Indonesia menyumbang 5% dari GRK dunia dimana dihasilkan dari proses industrialisasi dan pembalakan hutan secara ilegal serta pembukaan lahan perkebunan dengan cara di bakar. Kerentanan Indonesia terhadap dampak perubahan iklim yang mengakibatkan pertumbuhan ekonomi terganggu dan tidak berkelanjutan menjadi pendorong Indonesia melakukan diplomasi lingkungan dengan memanfaatkan poin poin pada *Bali Action Plan* pada COP ke 13, skema REDD+ menjadi acuan dalam politik lingkungan luar negeri Indonesia menghadapi permasalahan lingkungan yang juga menjadi perhatian negara-negara yang peduli terhadap degradasi lingkungan.

Bertolak pada konvensi tingkat tinggi perubahan iklim di Paris pada tahun 2015 Indonesia sangat berkepentingan untuk meratifikasi perjanjian Paris karena kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan menjadi ancaman terhadap dampak perubahan iklim dan sekaligus tantangan untuk merubah pola pembangunan rendah karbon sesuai dengan sustainable development goals Perjanjian Paris. Indonesia berkomitmen menurunkan gas emisi pada tahun 2030 hingga pada angka 29% dengan upaya sendiri, dan 41% dengan bantuan internasional. Jika Perjanjian Paris sudah enter into force, maka persidangan dalam membangun instrumen pelaksanaan Perjanjian Paris akan dilakukan dibawah CMA, dimana hanya negara pihak (parties) yang sudah meratifikasi PA (Paris agreement) saja yang berhak ikut dalam persidangan tersebut, sehingga jika Indonesia ingin menjaga kepentingan nasionalnya maka Indonesia harus menjadi bagian dari negara pihak yang meratifikasi Perjanjian Paris. Dengan demikian Indonesia dapat menjalankan program pengurangan emisi gas dan degradasi hutan tanpa harus mengorbankan pertumbuhan ekonomi.

Kata Kunci :Kebijakan luar negeri Indonesia, Lingkungan internasional, Perubahan iklim, Politik lingkungan

## **HALAMAN MOTTO**

**KITA TIDAK AKAN MEMILIKI MASYARAKAT BILA KITA  
MERUSAK LINGKUNGAN**

**“MARGARET MEAD”**

**APAKAH ARTINYA KESENIAN, BILA TERPISAH DARI DERITA  
LINGKUNGAN? APAKAH ARTINYA BERPIKIR, BILA TERPISAH  
DARI MASALAH KEHIDUPAN**

**“W.S. RENDRA”**

**DIA YANG TIDAK MEMILIKI KEHIDUPAN SENDIRI AKAN  
MENJADI BUDAK DARI LINGKUNGAN SEKITARNYA**

**“HENRI FREDERIC AMIEL”**

## KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr.Wb.

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah S.W.T atas segala nikmat, karunia, serta hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini. Shalawat serta salam tidak lupa penulis haturkan kepada Nabi Muhammad S.A.W yang telah membawa kemajuan besar kepada umat manusia di dunia.

Setelah melewati berbagai rintangan, penyusunan Tesis berjudul **“POLITIK LUAR NEGERI INDONESIA DALAM ISU LINGKUNGAN : STUDI KASUS “KEPENTINGAN INDONESIA DALAM KTT PERUBAHAN IKLIM DI PARIS TAHUN 2015”** pada akhirnya dapat terselesaikan. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan ini masih terdapat banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Namun penulis berharap semoga Tesis ini dapat membantu pihak-pihak yang berkepentingan maupun dapat mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya Ilmu Hubungan Internasional.

Penulis juga menyadari sepenuhnya bahwa tanpa bantuan dari berbagai pihak, penulisan Tesis ini tidak dapat berjalan lancar. Oleh sebab itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar – besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Ir. Gunawan Budiyanto, M.P, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
2. Bapak Sri Atmaja P Rosyidi, M.Sc.Eng., Ph.D, PE selaku Direktur Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
3. Bapak Dr. Surwandono, selaku Ketua Program Magister Ilmu Hubungan Internasional

4. Bapak Ali Muhammad, Ph.D selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan waktu, pikiran, dan tenaganya untuk membantu penulis menyelesaikan tesis ini.
5. Bapak Ali Maksum, Ph.D selaku Dosen Penguji I yang telah memberikan pengarahan, kritik, dan saran kepada penulis.
6. Bapak Prof. Tulus Warsito selaku Dosen Penguji II yang juga telah memberikan pengarahan kepada penulis dalam pembuatan tesis ini agar menjadi lebih baik lagi.
7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Magister Ilmu Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
8. Bapak Tejo, Ibu Inung, dan Mas Tholha yang selalu sabar menjawab pertanyaan mengenai administrasi di kampus UMY.
9. Ibunda H. Insah yang luar biasa pengorbanannya bagi ananda. Terimakasih banyak mak, semoga dapat membahagiakan amak setelah ini.
10. Alm. Abak yang selalu jadi panutan selama ini. InsyaAllah abak bahagia.
11. Papa Saleh mahifa dan Ma yg selalu menyemangati ananda. I love u both.
12. Nan dan the mega kakak yang luar biasa memberi dukungan moril dan materil. Semoga calon ponakan ku dapat bangga terhadap tantenya. Amin
13. Ko Iqi yang tak pernah lelah dalam menyemangati diri ini. Sekarang kita sama sama magister love.
14. Seluruh Teman, Sahabat, dan Keluarga Besar MIHI UMY atas semua motivasi dan dorongannya.
15. Semua pihak yang turut membantu penulis dalam menyelesaikan tesis ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Terima Kasih kepada semua orang yang disebutkan diatas untuk segala budi dan amal baiknya selama ini semoga Allah S.W.T memberikan balasan yang berlipat ganda. Akhirnya semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin.

Wassalamualaikum Wr.Wb

Yogyakarta, 9 Agustus 2017

DESI ARISANTI

## ABSTRAK

Isu tentang pemanasan global telah menjadi ancaman bagi keamanan setiap manusia, karena semakin meningkatnya jumlah emisi gas rumah kaca (GRK) yang dihasilkan di bumi dan faktor penyebab adalah aktivitas manusia yang secara terus menerus menggunakan bahan bakar yang berasal dari fosil seperti batubara, gas bumi dan minyak bumi. Pada saat ini peningkatan emisi GRK tidak hanya disebabkan oleh sektor industri yang dihasilkan oleh negara maju, namun negara berkembang juga ikut terlibat menyumbang emisi GRK. Peningkatan emisi ini dihasilkan dari deforestasi dan degradasi hutan yang telah mencapai 20% dari keseluruhan emisi GRK global setiap tahunnya.

Indonesia menyumbang 5% dari GRK dunia dimana dihasilkan dari proses industrialisasi dan pembalakan hutan secara ilegal serta pembukaan lahan perkebunan dengan cara di bakar. Kerentanan Indonesia terhadap dampak perubahan iklim yang mengakibatkan pertumbuhan ekonomi terganggu dan tidak berkelanjutan menjadi pendorong Indonesia melakukan diplomasi lingkungan dengan memanfaatkan poin poin pada *Bali Action Plan* pada COP ke 13, skema REDD+ menjadi acuan dalam politik lingkungan luar negeri Indonesia menghadapi permasalahan lingkungan yang juga menjadi perhatian negara-negara yang peduli terhadap degradasi lingkungan.

Bertolak pada konvensi tingkat tinggi perubahan iklim di Paris pada tahun 2015 Indonesia sangat berkepentingan untuk meratifikasi perjanjian Paris karena kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan menjadi ancaman terhadap dampak perubahan iklim dan sekaligus tantangan untuk merubah pola pembangunan rendah karbon sesuai dengan sustainable development goals Perjanjian Paris. Indonesia berkomitmen menurunkan gas emisi pada tahun 2030 hingga pada angka 29% dengan upaya sendiri, dan 41% dengan bantuan internasional. Jika Perjanjian Paris sudah enter into force, maka persidangan dalam membangun instrumen pelaksanaan Perjanjian Paris akan dilakukan dibawah CMA, dimana hanya negara pihak (parties) yang sudah meratifikasi PA (Paris agreement) saja yang berhak ikut dalam persidangan tersebut, sehingga jika Indonesia ingin menjaga kepentingan nasionalnya maka Indonesia harus menjadi bagian dari negara pihak yang meratifikasi Perjanjian Paris. Dengan demikian Indonesia dapat menjalankan program pengurangan emisi gas dan degradasi hutan tanpa harus mengorbankan pertumbuhan ekonomi.

Kata Kunci :Kebijakan luar negeri Indonesia, Lingkungan internasional, Perubahan iklim, Politik lingkungan

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN .....	iii
MOTTO.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK .....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR .....	xii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Tujuan Penelitian.....	9
C. Manfaat Penelitian.....	10
D. Rumusan Masalah .....	11
E. Tinjauan Pustaka .....	11
F. Landasan Konseptual .....	18
G. Argument Utama .....	29
H. Metodologi Penelitian .....	29
I. Sistematika penulisan .....	34
BAB II SEJARAH PELAKSANAAN KONVENSI PERUBAHAN IKLIM.....	36
A. Perjalanan Pelaksanaan Konvensi Perubahan Iklim .....	36
B. Badan- Badan Pembantu Pelaksanaan CoP.....	56
C. Mekanisme Fleksibel.....	58
BAB III KEBIJAKAN LINGKUNGAN LUAR NEGERI INDONESIA .....	65
1. Program Pengembangan <i>Ownership</i> dan Komitmen Kementerian/ Lembaga, Pemerintah Daerah, dan Lembaga Legislatif .....	79
2. Program Penyusunan Kerangka Kerja dan Jaringan Komunikasi NDC.....	80
3. Program Enabling Environment.....	81
4. Program Pengembangan Kapasitas .....	82
5. Program <i>One Data Policy</i> Emisi Gas Rumah Kaca.....	82
6. Program Penyusunan Kebijakan, Rencana dan Program (KRP) Intervensi .....	83
7. Program Penyusunan Pedoman Pelaksanaan NDC.....	84
8. Program Review NDC.....	85
BAB IV KEPENTINGAN INDONESIA DALAM KTT PERUBAHAN IKLIM DI PARIS TAHUN 2015 .....	87
A. Kepentingan Ekonomi Indonesia dalam KTT perubahan Iklim Paris tahun 2015 .....	88

B. Kepentingan Politik Indonesia dalam KTT perubahan Iklim Paris Tahun 2015.....	107
BAB V KESIMPULAN .....	113
DAFTAR PUSTAKA.....	117
LAMPIRAN	

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 <i>Literatur Review</i> .....	16
Tabel 3.1 Prioritas Nasional .....	67
Tabel 3.2 lembaga- lembaga dalam visi Pembangunan bersih .....	70
Tabel 3.3 Target penurunan GRK pada 5 sektor utama .....	75
Tabel 4.1 Strategi pengemangan pasar karbon di Indonsia.....	96
Tabel 4.2 Negara dengan karbon tertinggi .....	110

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Kenaikan suhu rata-rata global berdasarkan data pengamatan dan proyeksi skenario <i>Representative Carbon Pathway</i> .....	3
Gambar 1.2 struktur konvensi perubahan iklim .....	5
Gambar 1.3 skema pembuatan kebijakan.....	24
Gambar 2.1 poin- poin kesepakatan perjanjian Paris .....	55
Gambar 2.2 prosedur koordinasi implementasi CDM.....	64
Gambar 4.1 ilustrasi <i>system trading</i> .....	95
Gambar 4.2 ilustrasi <i>joint crediting mechanism</i> .....	102